



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYANTI ASVIATUTI
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 1000160

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 297.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 297.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 125.000.000

1. MOTOR, HONDA F1C02N46LOA/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, MAZDA BIANTE 2.0 L G AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BEJ C A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 472.000.000

III. HUTANG Rp. 127.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 345.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAHRIR
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 991913

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	145.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	6.000.000
1. MOTOR, SUPRA X 125 BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	750.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	151.750.000

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **151.750.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DUBELA RIADI M
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 471469

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.098.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/150 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/100 m2 di KAB / KOTA WAY KANAN, Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 3.771 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. Tanah Seluas 2.685 m2 di KAB / KOTA WAY KANAN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA WAY KANAN, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
6. Tanah Seluas 38 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
7. Tanah Seluas 81 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 121.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **222.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA FINO FINO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, SUZUKI AVI414F SDX (4X2) Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000



3. MOBIL, DAIHATSU GRAN MAX MICRO/MINIBUS Tahun 2018,
HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
4. MOTOR, YAMAHA GRAND FILANO Tahun 2025, HASIL SENDIRI
Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.325.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 140.000.000

Sub Total Rp. 1.465.925.000

III. HUTANG Rp. 370.318.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.095.607.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.